

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU .
PEMERINTAH KOTA DUMAI

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Isu-isu Strategis	4
1.5 Cascading Kinerja	4
1.6 Peta Proses Bisnis	5
1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS.....	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Tujuan dan sasaran	9
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program	12
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS.....	16
A Capaian Kinerja Dinas	16
3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024	18
3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	19
3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target renstra	22
3.4 Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional	24
3.5 Analisa penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi	24
3.6 Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	27
3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	29
3.8 Prestasi dan Penghargaan	29
B Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	33

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 beserta lampiran perubahan
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2024
7. Penghargaan (jika ada)

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.....dst
- Tabel 2.....dst
- Tabel 3.....dst
- Tabel 4.....dst
- Tabel 5.....dst

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.....dst	
Grafik 2.....dst	
Grafik 3.....dst	
Grafik 4.....dst	
dst	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....dst

Gambar 2.....dst

Gambar 3.....dst

Gambar 4.....dst

dst



SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DATA LAPORAN LKIP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENDRA, S.Sos,M.Si
NIP. : 19660724 198602 1 002
Pangkat /Gol : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Dumai

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) yang dikirim melalui link sesuai dengan yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan benar berdasarkan data *un audit* per tanggal 31 Desember 2024 yang bersumber pada:

1. Perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026
2. DPPA DPMPTSP Tahun Anggaran 2024
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dan Perubahan Tahun 2024
4. Laporan SPJ Fungsional Pada Sistem SIPKD Tahun 2024.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dumai, Januari 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



HENDRA, S.Sos, M.Si
NIP. 196607241986021002

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Dumai, Januari 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



HENDRA, S.Sos, M.Si
Pembina utama Muda/(IV/c)
NIP. 196607241986021002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor ...Tahun ...tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, maka sebagai unsur teknis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Dumai menjalankan fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai melaksanakan MISI yang ke 1 dan 4 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu “ Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Industri “ dan “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik “ dan SASARAN yang ke 1

dan 5 yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu “ **Meningkatnya pertumbuhan Investasi dan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan** “

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai 2021 – 2026 telah menetapkan 2 (Dua) Tujuan dengan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 6 (Enam) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 43 (Empat Puluh Tiga) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2024 antara lain:

- I. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
- II. Program Promosi Penanaman Modal
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
- III. Program Pelayanan Penanaman Modal
 1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang Perizinan berusaha berbasis resiko

Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan

IV. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

Sub Kegiatan Bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha.

Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

V. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Dumai pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai pada Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1 Perusahaan
2.	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	10.500.000.000.000
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,65

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar 10.483.586.620,- (*Sepuluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus*

Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) untuk melaksanakan 6 (Enam) Program Kerja antara lain :

Tabel 1.2

Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Dumai

N O.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.349.732.640	APBD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 275.000.000	APBD
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 175.000.000	APBD
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 190.000.000	APBD
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 552.174.000	APBD/APBN
6.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 20.000.000	APBD
J U M L A H		Rp. 10.159.732.640	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Dumai tahun 2024

N O	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.335.852.620	APBD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 275.000.000	APBD
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 110.560.000	APBD
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 190.000.000	APBD
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 552.174.000	APBD/APBN
6.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 20.000.000	APBD

J U M L A H	Rp. 10.483.586.620	
--------------------	---------------------------	--

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4

Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2024	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1 Perusahaan	1 Perusahaan	100%	✓			
2.	Meningkatnya realisasi investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	10.500.000.000.000	10.224.124.528.217	97,5%	✓			
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.65	89.50	103%	✓			

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai selama tahun 2024 termasuk kategori Sangat Tinggi (≥ 90) yaitu Sangat Berhasil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp.10.483.586.620 (*Sepuluh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah*) bersumber dari APBD dan APBN Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 10.063.557.400 (*Sepuluh milyar enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp.420.029.220 (*Empat ratus dua puluh juta dua puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah*).

1.	Belanja Operasi	:	Rp.	10.063.557.400
2.	Belanja Modal	:	Rp.	420.029.220
	Jumlah	:	Rp.	<u>10.483.586.620</u>

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel1.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tahun 2024

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan Investasi	Laju Pertumbuhan nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)						
Sasaran : Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1 Perusahaan	1 Perusahaan	100%			47.20%
Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi	44%	44%	100%	275.000.000	138.785.581	50%
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase minat investor terhadap peningkatan investasi	10%	10%	100%	110.560.000	64.793.090	59%
Sasaran : Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rupiah)	10.500.000.000.000	10.224.124.528.217	97,5%			62%
Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi investasi Kota Dumai	100%	100%	100%	552.174.000	339.694.750	62%
Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Mutu Pelayanan						
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,65	89.50	103%			42%
Program : Pelayanan Penanaman Modal	Persentase tingkat kepuasan masyarakat yang menerima layanan perizinan	85%	85%	100%	190.000.000	108.249.185	57%
Program : Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengelolaan data dan informasi yang dipublikasi	100%	100%	100%	20.000.000	13.556.900	68%

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2024. Adapun Efisiensi penggunaan Sumbaer Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Efisiensi penggunaan Sumbaer Daya Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI	KETERANGAN
1.	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	100%	47.20	211,86%	Efisien
2.	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	97,5%	62%	157.26%	Efisien
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	103%	42%	245.24%	Efisien

Analisis atas efisiensi peggunaan sumber daya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada *Indikator Kinerja Utama Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)* persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (47.20%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**
2. Pada *Indikator Kinerja Utama Jumlah Nilai Investasii Berskala Nasional (PMDN/PMA)* persentase capaian kinerja tahun 2024 (97.5%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (62%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**
3. Pada *Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat* persentase persentase capaian kinerja tahun 2024 (103%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (42%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKIP**) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau persentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 21 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2016;

4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah, Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

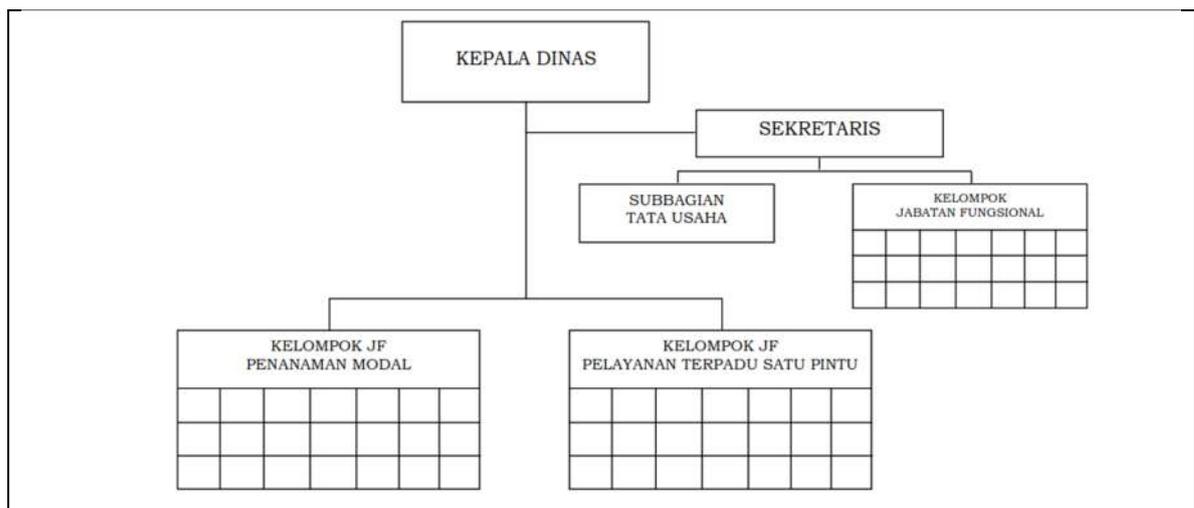
1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanamanmodal dan

- 4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- 5. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Tata Usaha; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.2
Struktur Organisasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;

1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;

1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah yang perlu ditangani sbb:

1. Masih kurangnya jumlah SDM yang berkualitas dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pelaku usaha.
2. Belum tersedianya pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang secara On Line terkait perizinan dan Non Perizinan yang tidak terakomodir di OSS Berbasis Resiko
3. Belum adanya regulasi terkait rencana umum penanaman modal dan potensi yang dimiliki Kota Dumai
4. Belum adanya regulasi terkait kemudahan berusaha di Kota Dumai
5. Belum adanya rencana strategis terkait promosi dalam rangka penyebarluasan Informasi tentang peluang investasi serta SDM yang mumpuni terkait promosi investasi.
6. Masih terbatasnya SDM dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan yang ada.

1.5 Cascading Kinerja

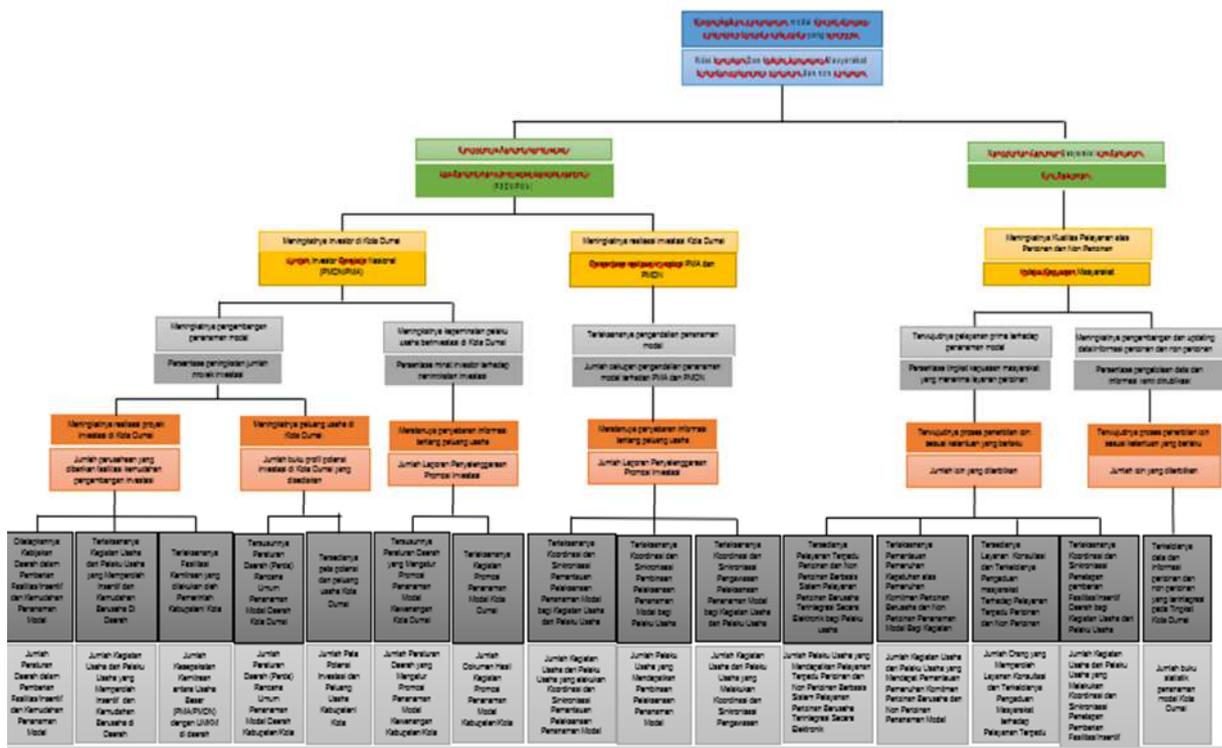
Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk

memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.4

Pohon Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai



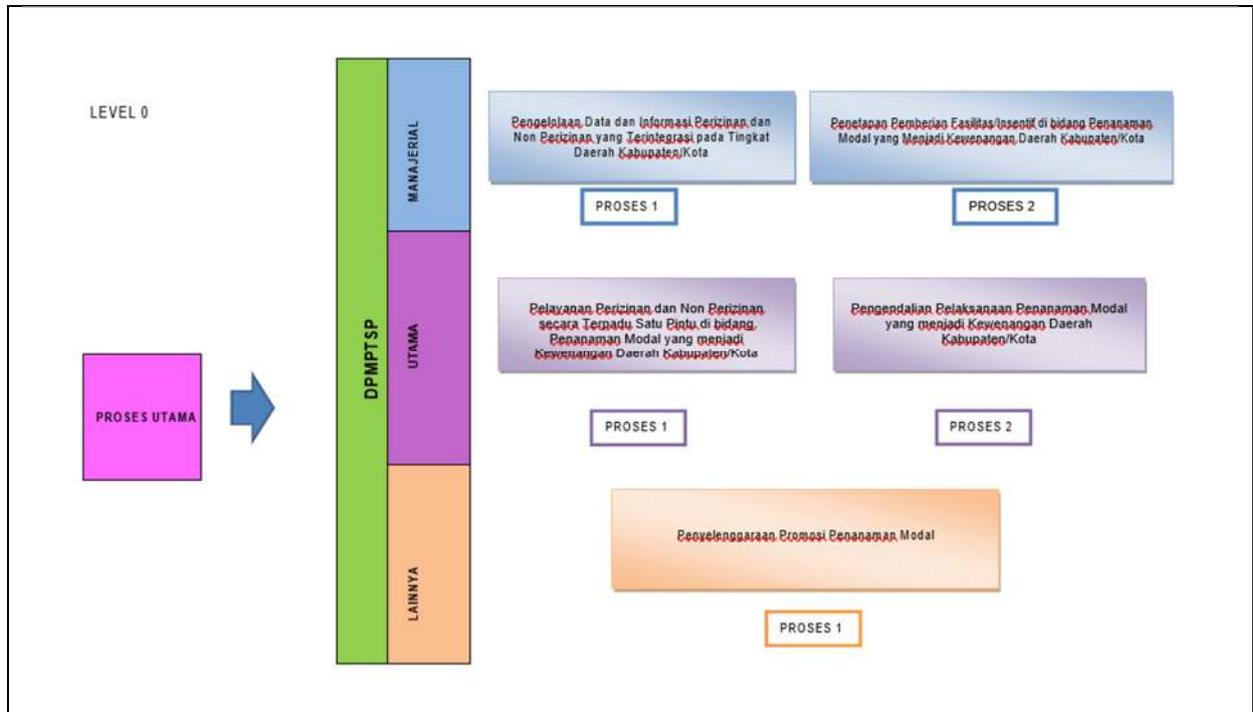
1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai sebagaimana skema berikut :

Gambar 1.6

Peta Proses Bisnis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.



1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1314.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023. Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

NO	REKOMENDASI LHE 2023	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	AKSI/ EVIDEN
1	Agar setiap pegawai pada DPMPTSP Kota Dumai perlu menetapkan rencana aksi yang mendukung capaian kinerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi tersebut secara berkala;	Seluruh PNS Dinas penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu Pintu agar membuat Rencana Aksi Tahun 2024	Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu Pintu Kota Dumai Tahun 2023 dapat dilihat pada link berikut:	20 Februari 2024	Sekretariat DPMPTSP	Selesai	https://drive.google.com/file/d/12pE84DTIkevyL55bbT8wzp8ppre0KA1/view?usp=drive_link
2	DPMPTSP Kota Dumai melakukan publikasi secara tepat waktu di masa yang akan datang;	Melakukan Up Date Publikasi terkait Renstra, Renja dan perjanjian Kinerja di Wbsite Perangkat daerah	Screenshot Wbsite DPMPTSP dapat dilihat pada link berkiut :	1 Maret 2024	Sekretariat DPMPTSP	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1_I3oQzvT9cyu_HzWBTekt_YuLI8zWx0w/view?usp=drive_link
3	DPMPTSP Kota Dumai dalam merumuskan perencanaan kinerja agar dapat memuat informasi mengenai keterkaitan hubungan kinerja/integrasi antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang dapat digambarkan melalui Crosscutting; dan	Membuat Crosscutting Dinas penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu Pintu Kota Dumai terkait informasi mengenai keterkaitan hubungan kinerja/integrasi antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain	Crosscutting DPMPTSP Kota Dumai dapat dilihat pada link berikut :	20 Febuarai 2024	Sekretariat DPMPTSP	Selesai	
4	DPMPTSP Kota Dumai perlu menyusun mekanisme atau Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengumpulan data dan pengukuran kinerja di masa mendatang.	Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data dan pengukuran kinerja DPMPTSP	Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data dan pengukuran kinerja DPMPTSP dapat dilihat pada link berkiut :	20 Febuarai 2024	Sekretariat DPMPTSP	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1O5hvhjU5VbKSFRDy9ITq4VL2pnLCG8YR/view?usp=drive_link

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

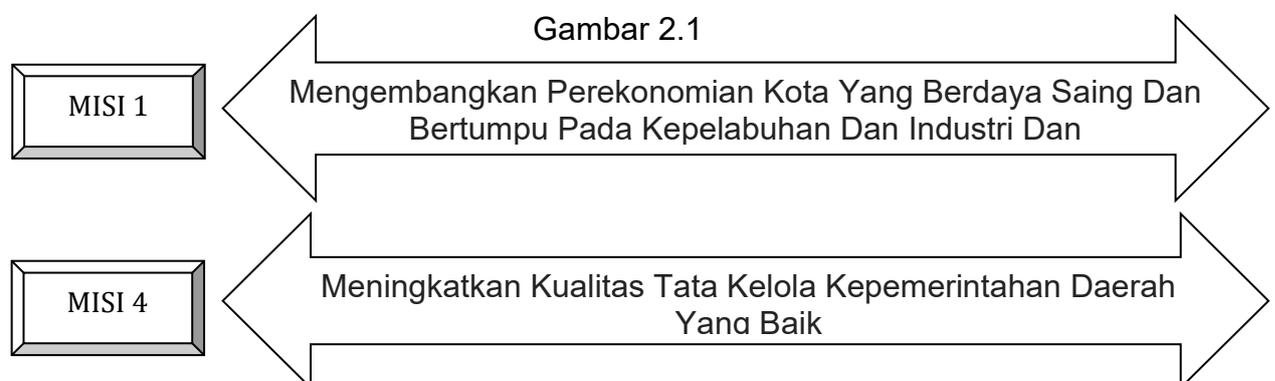
Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi perubahan RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan

mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam perizinan dan non perizinan dimanifestasikan dalam perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 – 2026 menyesuaikan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .Tahun 2021-2026

IKU WALI KOTA			IKU DINAS DPMPSTP		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Renstra
Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah dengan indikator keberhasilan yaitu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)ADHK	Nilai realisasi PMA dan PMDN	Meningkatnya pertumbuhan Investasi	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
				Meningkatnya realisasi investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Indikator Keberhasilan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Layanan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik dan indeks inovasi daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

Strategi dan Kebijakan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI ke... : Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya saing dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	Meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah	1. Peningkatan daya saing daerah dan iklim berusaha	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan investasi 2. Mewujudkan kelembagaan yang tanggap dan Tangguh untuk kemajuan investasi Dumai 3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang kondusif untuk meningkatkan daya saing pendukung ekonomi daerah

2. Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Pelaksanaan Pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan kondisi pelayanan public yang sesuai dengan standar pelayanan prima 2. Melaksanakan akses masyarakat pada sistem informasi manajemen daerah. 3. Mewujudkan saluran akses formal aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
-------------------------------------	--	---	--

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.3.2
 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
2	Meningkatnya realisasi investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai di Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.4.1
 Perjanjian Kinerja
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1 Perusahaan
2.	Meningkatnya realisasi investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	10.500.000.000.000
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.65

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 10.483.586.620,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) untuk melaksanakan 6 (Enam) Program Kerja antara lain :

Tabel.2.4.2
Program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.349.732.640	APBD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 275.000.000	APBD
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 175.000.000	APBD
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 190.000.000	APBD
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 552.174.000	APBD/APBN
6.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 20.000.000	APBD
J U M L A H		Rp. 10.159.732.640	

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 september 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.4.3
Program kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu satu Pintu Kota Dumai.

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.335.852.620	APBD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 275.000.000	APBD
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 110.560.000	APBD
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 190.000.000	APBD
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 552.174.000	APBD/APBN
6.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 20.000.000	APBD
J U M L A H		Rp 10.483.586.620	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DUMAI TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Dumai

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian

kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus : $\text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

b. Rumus : $\text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 3.2

Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

a. Indikator Jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA)

Capaian kinerja untuk indikator Jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA) menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 1 Perusahaan realisasi sebesar 1 Perusahaan, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 1 Perusahaan atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 tetap sebesar 100%

Efisiensi Anggaran	52.80.%
Nilai Anggaran	Rp. 385.000.000
Capaian 2024	100 %
Target	1 Perusahaan
Realisasi	1 Perusahaan

b. Indikator Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA).

Capaian kinerja untuk indikator Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah Rp.10.500.000.0000.000 realisasi sebesar Rp.10.224.124.528.217 sampai dengan Triwulan Tiga Tahun 2024 tercapai 97.5% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 3.386.922.760.000. atau tercapai sebesar 35.%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 202%

Efisiensi Anggaran	38.%
Nilai Anggaran	Rp. 522.174.000.
Capaian 2024	97.5 %
Target	Rp.10.500.000.000.000
Realisasi	Rp.10.224.124.528.217

c. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Capaian kinerja untuk indicator Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 85,65 realisasi sebesar 89,50 tercapai 103.33% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 95.40 atau tercapai sebesar 118%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 6%

Efisiensi Anggaran	42%
Nilai Anggaran	Rp. 210.000.000.
Capaian 2024	103.33%
Target	85,65
Realisasi	89.50

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

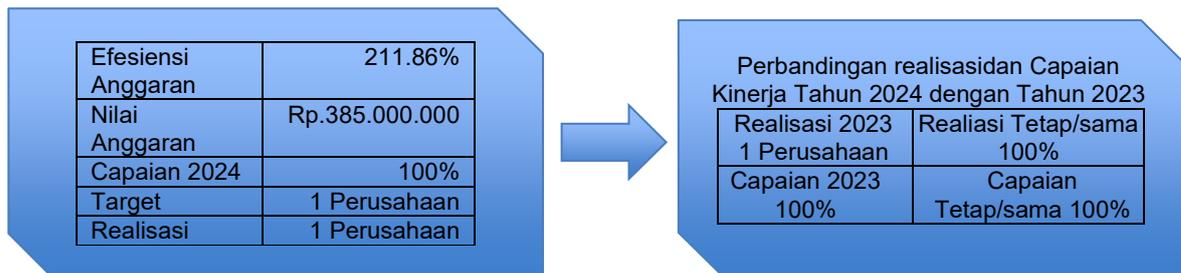
Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA)	1 Perusahaan	1 Perusahaan	1 Perusahaan	1 Perusahaan	1Perusahaan	1 Perusahaan	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rupiah)	8.505.000.000.000	9.450.000.000.000	10.500.000.000.000	13.058.828.385.000	3.386.922.760.000	10.224.124.528.217	153.54%	35%	97,5%
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	85.03	85.03	85,65	85	95,40	89.50	100%	111%	103%

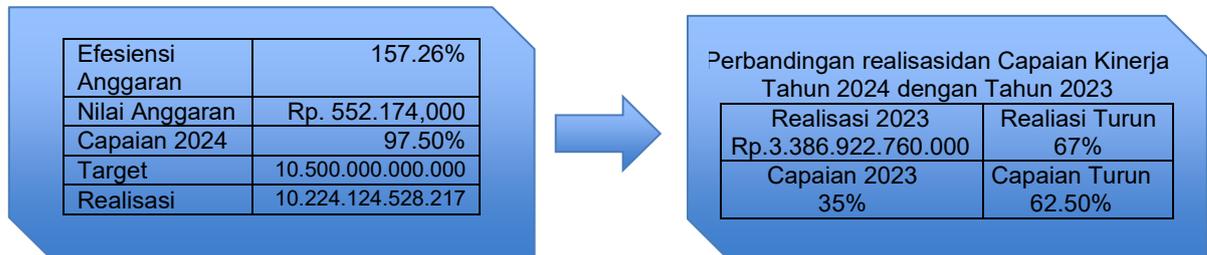
Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA) dengan target pada tahun 2022 adalah 1 perusahaan berasal dari perhitungan nol/kosong dibagi dengan tahun sebelumnya yang nol/kosong karena direncana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2016-2021 belum terdapat indikator dimaksud.
- b. Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai menetapkan target sebanyak 1 (satu) perusahaan baru dibidang industry yang masuk ke Kota Dumai. Realisasi pada tahun 2023 adalah 1 Perusahaan dengan capaian 100%.
- c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap menjadi 1 Perusahaan baru yang masuk ke Kota Dumai dan realisasinya adalah 1 perusahaan dengan rincian 1 perusahaan baru disektor industri di Kota Dumai capaian kinerja 100%.



- 2 a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rupiah) dengan target pada tahun 2022 adalah Rp. 8.505.000.000.000 berasal dari perhitungan Tahun 2021 sebesar Rp. 7.500.000.000.000 dikurangi Target Tahun 2020 sebesar Rp. 6.815.000.000.000 dibagi dengan tahun 2021 yang sebesar Rp. 7.500.000.000.000 dikali 100% sehingga didapat kenaikan target setiap tahunnya sebesar 10% atau sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000.000.000 karena direncana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2016-2021 sudah tersusun kenaikan target setiap tahunnya sebesar 10%.
- b. Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai menetapkan target sebesar Rp.9.450.000.000.000 yang masuk ke Kota Dumai. Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.386.922.760.000 dengan capaian 35%.

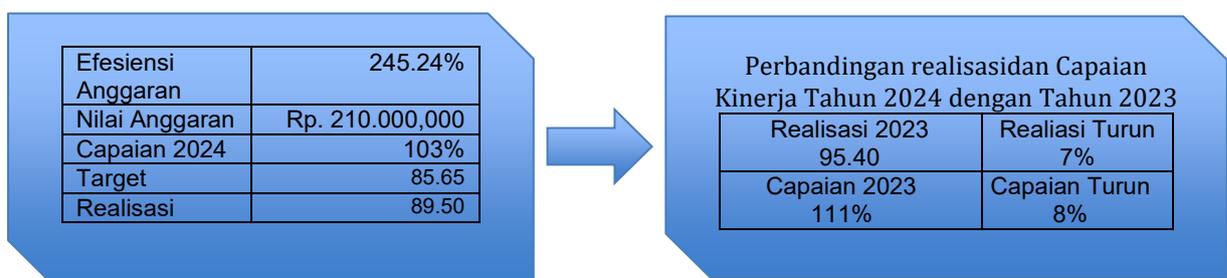
c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap menjadi sebesar Rp. 10.500.000.000.000 yang masuk ke Kota Dumai dan realisasinya adalah sebesar Rp. 10.224.124.528.217 sampai dengan triwulan ke 3 (tiga) Tahun 2024 dengan capaian kinerja 97,5%.



3. a. . Indikator Kinerja Utama yang ke tiga adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target pada tahun 2022 adalah 85.03 berasal nilai target indeks kepuasan masyarakat yang terdapat didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026.

b. Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai menetapkan target sebesar 85.03. Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 95.40 dengan capaian 111%.

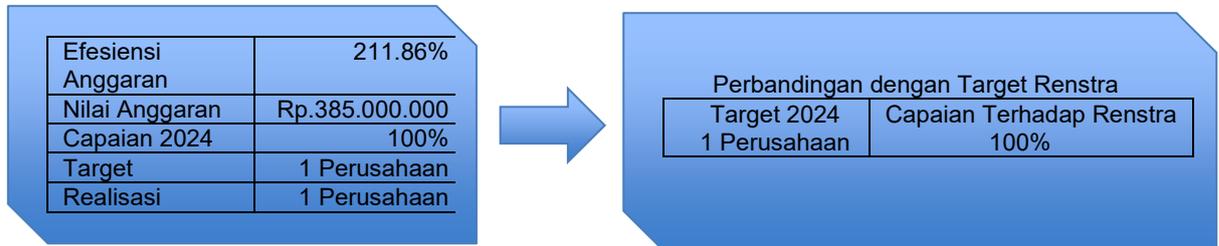
c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap menjadi sebesar 85.65 dan realisasinya adalah sebesar 89.50 dengan capaian kinerja 103%.



3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

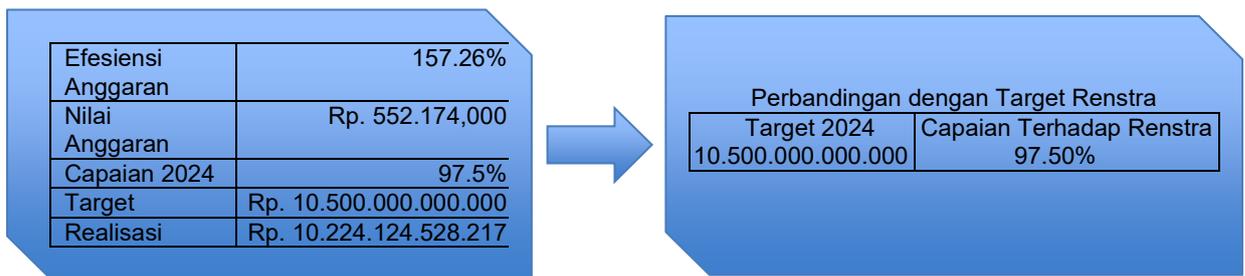
Perbandingan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yaitu:

Indikator Jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA).Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA) tahun 2024 cukup dari target akhir Renstra yaitu sebesar 100% dari target Renstra sebesar 1 Perusahaan dan terealisasi 1 Perusahaan pada tahun 2024



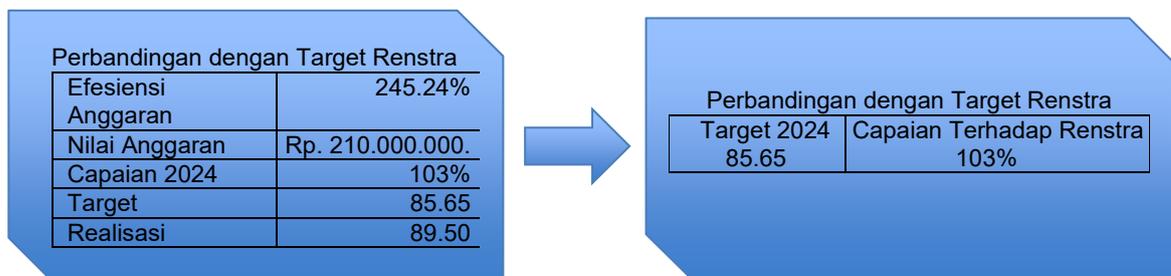
b. Indikator Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rupiah)

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rupiah). tahun 2024 kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 2.5% dari target Renstra sebesar Rp. 10.500.000.000.000 dan terealisasi Rp. 10.224.124.528.217 pada tahun 2024



c. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 103% dari target Renstra sebesar 85.65 poin dan terealisasi 89.50 poin pada tahun 2024



3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan standar Nasional sebagaimana tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	STANDAR NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1 Perusahaan		Tidak ada standar nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
2	Meningkatnya realisasi investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 10.224.124.528.217		
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	89.50		

3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi

1. Indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

1. Capaian kinerja untuk indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 1 Perusahaan realisasi sebesar 1 Perusahaan, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 1 Perusahaan atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 tetap sebesar 100%

2. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Iklim Investasi Daerah yang Kondusif
- Infrastruktur Sarana dan prasaran di daerah kawasan industri yang semakin membaik.
- Faktor keamanan daerah sangat kondusif untuk pembangunan sebuah investasi

3. Faktor penghambat Capaian Indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) adalah sebagai berikut:

- Masih terdapat kurang SDM di Bidang Penanaman modal terkait tenaga IT dibidang multi media.

4. Tindak lanjut Capaian Indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) adalah sebagai berikut:

- lebih meningkatkan promosi investasi terkait penanaman modal daerah

2. **Indikator Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)**

a. Capaian kinerja untuk indikator Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah Rp.10.500.000.000.000 realisasi sampai dengan triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp. 10.224.124.528.217 tercapai 97.5% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 3.386.922.760.000. atau tercapai sebesar 35%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 62.5%

b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Terdapat sistem OSS dari pemerintah pusat yang memudahkan pihak swasta dalam melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
- Meningkatnya kesadaran para investor untuk melaporkan kegiatan penanaman modalnya tepat waktu.

c. Faktor penghambat Capaian Indikator Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) adalah sebagai berikut:

- Kurangnya SDM dalam melakukan pengawasan terhadap progres kegiatan penanaman modal di daerah.
- Masih kurangnya pelatihan dan Bimtek terkait pengawasan kegiatan penanaman modal bagi SDM yang ada.

d. Tindak lanjut Capaian Indikator Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) adalah sebagai berikut:

- Lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal yang masuk ke daerah.
- Lebih meningkatkan pelatihan dan Bimtek bagi ASN yang bertugas terkait penanaman modal baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- Lebih meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam hal aliran investasi yang masuk ke Kota Dumai.

3. **Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.**

a. Capaian kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 85.65 realisasi sebesar 89.50, tercapai 103% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 95.40 atau tercapai sebesar 111%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 7%

b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Semakin baiknya sarana dan Prasarana yang dimiliki terkait pelayanan
- Semakin tingginya tingkat kesadaran terkait standar pelayanan dikalangan petugas pelayanan yang ada.
- Semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan dalam rangka evaluasi perbaikan kedepan- dst

c. Faktor penghambat Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- Masih adanya masyarakat yang kurang mengertinya pengisian quisioner yang ada
- Belum semua masyarakat yang memiliki handphone android terkait barcode pengisian pertanyaan terkait survey kepuasan

d. Tindak lanjut Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- Lebih meningkatkan lagi pelayanan yang ada dalam rangka menuju pelayanan prima
- Melakukan inovasi terkait pelayanan yang diberikan baik secara IT.

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel3.6

.Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	IKU	sasaran Program	indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	capaian anggaran (%)
1	Meningkatkan pertumbuhan Investasi	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	44	100	%	275.000.000	138.785.581	50%
2				Promosi Penanaman Modal	10	100	%	110.560.000	64.793.090	59%
3		Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	100	%	552.174.000	339.694.750	62%
4	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pelayanan Penanaman Modal	85	100	%	190.000.000	108.249.185	57%
5				Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	100	100	%	20.000.000	13.556.900	68%

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
1	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	100%	47.20
2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	97,5%	62%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	103%	42%

Berdasarkan table diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)* yaitu tingkat efisiensinya adalah 211,86% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (47.20%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional* yaitu tingkat efisiensinya adalah 157.26% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (97.50%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (62%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT**;
- c. Pada *Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat* yaitu tingkat efisiensinya adalah 245.24% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (103%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (42%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT**;

3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8
Prestasi dan Penghargaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2024

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1				
2				
3				
4				

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun Anggaran per Sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel B.1
Ringkasan Anggaran dan realisasi Tahun 2024

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi
1	Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.483.586.620	760.405.256
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	471.513.700	23.547.500
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.581.400	5.222.500
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.320.500	3.143.300
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.166.300	3.762.300
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.879.700	3.462.500
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.966.300	
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.281.100	7.506.900
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.318.400	450.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.107.412.620	4.821.873.554
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.107.412.620	4.821.873.554
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.500.000	0
	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.500.000	0
	2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000	0
	3 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	0
	4 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	0

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	171.878.940	57.917.000
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	71.908.200	0
	2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	99.970.740	57.917.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.064.342.000	690.708.647
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	30.627.800
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.000.000	140.427.600
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	160.000.000	134.207.200
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000	83.520.000
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	92.432.200
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	4.378.000
	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	329.342.000	205.115.847
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	427.029.220	216.832.000
	1 Pengadaan Mebel	187.187.520	100.846.000
	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.000.000	32.200.000
	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.841.700	83.686.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.073.196.140	1.577.930.859
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	0
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.000.000	439.447.399
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.418.196.140	1.138.483.460
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.980.000	71.595.706
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.000.000	16.500.000
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.340.000	5.923.544
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.640.000	49.172.162
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	0
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	275.000.000	138.785.581
	1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	37.016.314
	1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50.000.000	37.016.314
	2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	225.000.000	101.769.267
	1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	51.396.267
	2 Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	75.000.000	50.373.000

3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		110.560.000	64.793.090
	1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		110.560.000	64.793.090
	1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaan Modal Daerah Kabupaten/Kota	10.560.000	10.530.000
	2	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	100.000.000	54.263.090
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		190.000.000	108.249.185
	1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		190.000.000	108.249.185
	1	Penyediaan Pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	50.000.000	37.101.278
	2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100.000.000	31.315.607
	3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko	40.000.000	39.832.300
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		552.174.000	339.694.750
	1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		552.174.000	339.694.750
	1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60.326.000	6.500.000
	2	Bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha	296.197.000	257.403.350
	3	Pengawasan Penanaman Modal	195.651.000	75.791.400
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		20.000.000	13.556.900
	1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Daerah Kabupaten/Kota		20.000.000	13.556.900
	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20.000.000	13.556.900

BAB IV

PENUTUP

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran selama tahun 2024. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPMPTSP Kota Dumai untuk meningkatkan kinerja.

A. Simpulan Umum

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Renstra DPMPTSP Kota Dumai Tahun 2021-2026 memiliki sasaran program beserta Indikator Kinerja dengan maksud agar dapat dilakukan penilaian terhadap pencapaian sasaran Strategis. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, DPMPTSP Kota Dumai melaksanakan 5 program pendukung yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
2. Dalam rangka mencapai visi dan misi Kota Dumai, DPMPTSP Kota Dumai menetapkan dua Indikator Kinerja Utama, yaitu:
 - 1) Jumlah Investor Baru Berskala Nasional (PMDN/PMA)
 - 2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA).
 - 3) Indeks Kepuasan Masyarakat

B. Simpulan Capaian Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai untuk Tingkat capaian kinerja terkait Indek Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan didalam RPJMD

maupun Rencana Kerja Tahunan dengan target tertentu telah tercapai dan sesuai secara keseluruhan. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Investor Baru Berskala Nasional (PMDN/PMA) yang ditahun 2024 telah ditargetkan 1 perusahaan telah tercapai sesuai target yakni sebesar 100%.
2. untuk Indek Kinerja Utama (IKU) yang berkaitan dengan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA).berdasarkan target yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar Rp. 10.500.000.000.000,- dan sampai dengan triwulan ke III tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 10.224.124.528.217,- atau hampir memenuhi dari target sebesar 97.50%.
3. Indek Kinerja Utama (IKU) yang berkaitan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil laporan monitoring dan evaluasi (internal) maupun hasil Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (eksternal) sudah dalam kategori “Baik”. Meskipun usaha yang telah dilakukan disadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Dan perlu perhatian dari Instansi dan pihak terkait dalam hal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan DPMPTSP Kota Dumai dalam rangka peningkatan pelayanan tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring kinerja yang dilakukan secara keseluruhan dari 6 Program 14 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan di dapati realisasi capaian kinerja rata – rata anggaran berada di angka 80 % atau dengan predikat tinggi sementara untuk realisasi capaian kinerja rata – rata berada diangka 77.51 %.Selain itu, penggunaan sumber daya keuangan dan SDM, secara umum telah digunakan secara efisien dan efektif.

Akhirnya dengan disusun Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi DPMPTSP Kota Dumai, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal laporan ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan *stakeholders*/mitra kerja, sehingga kontribusi DPMPTSP dalam pembangunan Kota Dumai menjadi Kota Idaman dapat lebih dirasakanmemberikan penjelasan simpulan terhadap capaian target, apakah telah/belum memenuhi target, apakah telah efisien dan apakah terdapat penghematan sumber daya dalam pencapaian target tahun 2024.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2024 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Dumai, Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DUMAI



HENDRA, S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19660724 198602 1 002

LAMPIRAN

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
				2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Investor di Kota Dumai	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	1
2	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Dumai	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	10.500.000.000.000
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,65

Dumai, 27 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DUMAI**



HENDRA, S. Sos., M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196607241986021002

PERJANJIAN KINERJA 2024



PERJANJIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HENDRA, S.Sos, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS
Jabatan : WALI KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, 1 Februari 2024
PIHAK PERTAMA

HENDRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19660724198602 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Investor di Kota Dumai	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	2
2	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	10.500.000.000
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Pertzinan dan Non Pertzinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	Program		
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 275,000,000	
2	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 175,000,000	
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 150,000,000	
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 190,000,000	
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 20,000,000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.349.732.640,00	Pendukung


PIHAK KEDUA
H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, 1 Februari 2024
PIHAK PERTAMA

HENDRA, S. Sos., M. Si
NIP. 196607241986021002

PERJANJIAN PERUBAHAN 2024



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENDRA, S. Sos., M. Si**
 Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
 Nama : **H. PAISAL, S.K.M., M.A.R.S.**
 Jabatan : **WALIKOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
 Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan keadailan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**. **Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



H. PAISAL, S.K.M., M.A.R.S.

Dumai, September 2024



HENDRA, S. Sos., M. Si

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI**

No.	Sebaran Strategis	Indikator Kinerja Baseline	Nilai	Target Tahunan
1	Meningkatnya Tingkat di Kota Dumai	Nilai investasi beresiko nasional (INICANNA)	0	2
2	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Dumai	Jumlah realisasi investasi nasional (INICANNA)	Kupiah	10.000.000.000.000
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jasa Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Keluasan Masyarakat	0	50
Keempat	Meningkatnya Investasi di Kota Dumai	PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENANAMAN MODAL	Rp.	275.000.000
4.1		Penetapan/Pembaruan Fasilitas/Insentif Stimulus Penanaman Modal yang Mengarah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	60.000.000
4.1.1		Penetapan kebijakan daerah mengenai penjabaran/realisasi/insentif dan stimulan penanaman modal	Rp.	50.000.000
4.1.2		Penyusunan Paket Paket Investasi Kabupaten/Kota	Rp.	30.000.000
4.2		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	150.000.000
4.2.2		Penyusunan Paket Paket Investasi Kabupaten/Kota	Rp.	70.000.000
5		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp.	110.000.000
5.1		Pengembangan Promosi Penanaman Modal yang Mengarah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	110.000.000
5.1.1		Pengembangan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	100.000.000
5.1.2		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Rp.	10.000.000
5.2		PROGRAM INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp.	90.174.000
5.2.1		Pengembangan Pelayanan Penanaman Modal yang Mengarah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	90.174.000
5.2.1.1		Pemenuhan pemenuhan dan tindakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Rp.	80.000.000
5.2.1.2		Stimulasi Tindakan Insentif Pajak/Utang	Rp.	200.000.000
5.2.1.3		Pengawasan Penanaman Modal	Rp.	100.000.000
Keempat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jasa Perizinan dan Non Perizinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp.	100.000.000
4.1		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Mengarah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	100.000.000

Persediaan Pelayanan Perizinan Berusaha		
4.1.1	melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp. 30.000.000
Persediaan dan Peningkatan Layanan		
4.1.2	Aksesitas Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko	Rp. 100.000.000
Pemenuhan Analisa, Evaluasi dan		
4.1.3	Poliperson di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Rp. 40.000.000
PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Rp. 30.000.000
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 30.000.000
4.1.1	Peningkatan Penyediaan Pemasokan Data dan Informasi Perizinan Berusaha dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 30.000.000
Jumlah		Rp. 1.147.734.000



H. PAISAL, S.K.M., M.A.R.S.

Dumai, September 2024



HENDRA, S. Sos., M. Si
Pembina Utama Madya
No. 950274190021002

Emonev tahun 2024

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN APBD ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI PERBULAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PIU/UKOTA DUMAI

NO	PROGRAM/KELOMPOK/ SUB KELOMPOK	PAGU ANGGARAN	REALISASI												ISSA PAGU ANGGARAN	% REALISASI		KET				
			TRIMULAN I			TRIMULAN II			TRIMULAN III			TRIMULAN IV				FISIK	KEUANGAN					
			JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES								
1	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.335.852.638	159.712.204	239.387.830	1.183.814.911	18,24%	625.731.234	598.597.733	793.798.302	23,63%	844.793.026	470.222.288	690.383.289	19,43%	570.894.874	345.822.068	694.816.289	26,57%	1.875.447.384	99%	79,91%	
1.	Pencapaian, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.813.788		3.988.000	8,21%	5.729.488		3.988.000	25,84%		7.388.188			15,01%			23.988.200	50%	49,98%			
	Pencapaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.987.488		2.700.000	41,62%	2.522.800			36,32%					0,00%			1.398.800	80%	75,00%			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.320.833			0,00%				0,00%		3.143.333			42,94%			4.177.500	49%	42,94%			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.196.300			0,00%			1.800.000	25,12%		1.982.333			27,26%			3.404.000	53%	52,00%			
	Koordinasi dan Penyusunan LPM-SKPD	6.879.700			0,00%			1.200.000	17,44%		2.282.933			33,88%			3.417.200	51%	50,00%			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.998.333			0,00%				0,00%					0,00%			5.998.333	100%	0,00%			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	9.281.100		1.200.000	12,93%	4.208.800		2.100.000	67,86%					0,00%			1.774.200	81%	85,88%			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.318.400			0,00%			400.000	10,42%					0,00%			3.988.400	92%	0,00%			
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.107.412.620	159.712.204	199.291.470	3,92%	345.097.987	374.286.128	695.398.919	20,07%	345.099.027	345.099.027	345.099.027	345.099.027	20,22%	345.099.027	345.099.027	330.064.000	23,94%	694.994.994	100%	94,47%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.107.412.620	159.712.204	199.291.470	3,92%	345.097.987	374.286.128	695.398.919	20,07%	345.099.027	345.099.027	345.099.027	345.099.027	20,22%	345.099.027	345.099.027	330.064.000	23,94%	695.000.000	100%	94,47%	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	8.988.888			0,88%				0,88%					0,88%			8.988.888	100%	8,88%			
	Penyusunan Penanaman Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.800.000			0,00%				0,00%					0,00%			2.800.000	100%	0,00%			
	Pengamatan Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000			0,00%				0,00%					0,00%			3.000.000	100%	0,00%			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000			0,00%				0,00%					0,00%			2.000.000	100%	0,00%			
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000			0,00%				0,00%					0,00%			2.000.000	100%	0,00%			
4.	Administrasi Kependudukan Persekolahan Daerah	101.478.949			0,98%				0,98%	9.999.000	99.999.000			17,88%		10.249.999	9,80%	113.991.000	107%	10,10%		
	Penyediaan Fasilitas Siswa beserta Meubel Kebutuhan	71.908.200			0,00%				0,00%					0,00%			71.908.200	100%	0,00%			
	Penyediaan Perawatan dan Penghapusan Bangunan Teknik Implementasi Penataan Persekolahan	99.970.749			0,00%				0,00%	4.940.200	40.632.800			47,93%		10.344.300	10,35%	42.003.740	90%	67,93%		
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.696.342.890		183.898.811	3,23%	28.791.889	62.628.198	117.875.310	19,48%	95.381.128	8.844.889	37.227.088			136.488.108	18.208.800	21,88%	373.833.383	65%	66,98%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	160.000.000		5.907.400	3,70%	1.800.000	1.998.000	1.988.000	5,00%		1.007.000			2,00%	16.730.400		10,45%	69.372.200	31%	30,62%		
	Penyediaan Perawatan dan Penghapusan Kantor	160.000.000		32.812.400	20,50%		9.979.700	15.427.300	15,28%	14.182.200				8,86%	49.046.000	20.181.000	43,27%	19.172.400	89%	67,77%		
	Penyediaan Perawatan Rumah Tameng	160.000.000		24.772.000	15,48%		10.028.400	15.175.400	15,79%	14.253.000				8,91%	40.757.200	25.215.800	43,74%	25.192.800	94%	63,88%		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.000.000		13.629.000	12,49%	2.000.000	12.249.000	19.049.000	27,90%	14.020.000	8.880.000	10.000.000		31,34%	1.000.000	6.900.200	7,14%	21.480.000	80%	79,94%		
	Penyediaan Barang Cakupan dan Penghapusan	200.000.000		16.459.300	8,23%		12.087.200	11.538.400	11,80%	10.400.200				5,20%	28.834.400	13.036.200	20,86%	107.587.000	47%	46,22%		
	Penyediaan Bahan Baku dan Penataan Persekolahan	10.000.000			0,00%		1.800.000		18,00%	792.000				7,92%		1.908.000	19,08%	5.622.000	44%	43,19%		

6.	Pengadaan Barang Milik Daerah	427.628.220			0,88%				0,88%		4.888.000	174.998.000			3.998.000	28.400.999	7,89%	219.187.220	51%	60,78%		
	Pengadaan Uraan Pemeliharaan Daerah				0,00%				0,00%						90.880.000	51,74%	3.998.000	2,13%	86.341.520	54%	53,67%	
	Pengadaan Meubel	187.187.520			0,00%				0,00%						3.880.000	2,09%	28.400.000	20,20%	157.700.000	24%	23,07%	
	Pengadaan Perawatan Dan Meubel Lainnya	140.000.000			0,00%				0,00%		9.488.000	74.200.000			83,82%		0,00%	16.108.700	84%	63,82%		
	Pengadaan Sertifikasi dan Prosektur Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.841.700			0,00%				0,00%						0,00%			16.108.700	84%	63,82%		
7.	Pengadaan Jasa Pengadaan Urusan Pemerintahan Daerah	2.873.198.140	96.118.240	224.297.864	7,84%	343.253.483	699.998.888	93.508.428	29,87%	231.283.173	58.827.341	137.488.108	19,82%	224.998.847	97.488.000	131.891.949	19,81%	493.283.281	77%	76,17%		
	Penyediaan Jasa Surat Mengenal	5.000.000			0,00%				0,00%								0,00%	5.000.000	0%	0,00%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Lainnya	850.000.000		107.809.324	12,59%	35.587.853	36.494.267	39.208.628	16,48%	37.038.113	41.412.341	36.341.420	17,88%	36.388.887	40.179.000	33.193.329	16,89%	210.582.001	100%	67,61%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	1.418.198.140	96.118.240	116.487.740	8,21%	207.865.200	66.116.240	20.289.000	22,81%	184.316.000	4.426.000	54.758.680	21,04%	187.758.180	17.490.000	97.888.620	21,27%	279.712.880	81%	80,20%		
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	434.988.000		6.879.888	1,58%	3.200.000	18.958.888	9.800.000	6,84%	5.188.000	11.288.000	19.887.162	6,89%		1.888.000	7.423.548	2,89%	383.284.294	81%	16,48%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pengecatan Kandang Persekolahan Dinas atau Kantor	19.000.000		4.500.000	23,68%	1.900.000	1.900.000	1.900.000	23,68%	1.500.000	1.900.000	1.900.000	23,68%		1.500.000	1.900.000	18,79%	2.900.000	100%	88,84%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan - Bangun Pemeliharaan Pagar dan Perawatan Kandang Dinas Operasional atau Lainnya	141.340.000			0,00%				0,00%						5.923.548	4,19%	139.416.452	9%	4,19%			
	Pemeliharaan Perawatan dan Meubel Lainnya	74.640.000		1.970.000	2,64%	1.800.000	15.400.000	8.000.000	10,69%	3.600.000	9.769.000	8.587.162	29,41%				0,00%	26.407.838	100%	85,80%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangun dan Pemasangan Pembungkusan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000			0,00%				0,00%								0,00%	200.000.000	0,00%	0,00%		
9.	PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENANAMAN MODAL	278.688.000			0,88%	28.495.000	44.818.318	29,84%	12.888.281	18.888.000	45.123.214	24,82%					0,88%	138.214.619	89%	96,47%		
1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang merangsang Investasi	88.888.000			0,88%				0,88%									12.383.888	79%	74,83%		
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengembangkan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	80.000.000			0,00%				0,00%						37.814.314	34,64%	0,00%	12.383.888	99%	74,00%		
2.	Pembinaan Peta Potensial Investasi Kabupaten/Kota	225.888.000			0,88%	28.495.000	44.818.318	21,99%	12.888.281	18.888.000	45.123.214	13,84%						123.230.733	41%	45,23%		
	Penyusunan/Ratifikasi atau Penataan Modal Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000			0,00%	3.735.000	30.881.918	22,86%	12.000.351		5.188.000	5.188.000	11,41%				0,00%	98.620.733	39%	34,20%		
	Penyusunan Peta Potensial Investasi Kabupaten/Kota	75.000.000			0,00%	22.720.000	14.088.000	49,08%			19.988.000	3.900.000	18,12%				0,00%	24.827.000	98%	67,76%		
10.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	119.588.000		5.290.888	4,42%	23.495.000	3.194.888	5.290.888	28,77%	3.831.488	8.881.000	16.448.000	28,31%				4,42%	49.796.910	39,98%	38,88%		
1.	Penyusunan Promosi Penanaman Modal yang merangsang Investasi	119.588.000		5.290.888	4,42%	23.495.000	3.194.888	5.290.888	28,77%	3.831.488	8.881.000	16.448.000	28,31%				4,42%	49.796.910	39,98%	38,88%		
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	10.880.000		5.290.000	48,12%	5.290.000			90,00%													

IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	198.000.000		33.186.890	17,47%	17.809.984	4.524.450	31.811.100	27,87%	14.338.364	2.299.307	8,76%	-	-	5.280.000	2,79%	81.758.815	97%	96,87%	
1	Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang meliputi Kawasan Daerah Kabupaten/Kota	198.000.000		33.186.890	17,47%	17.809.984	4.524.450	31.811.100	27,87%	14.338.364	2.299.307	8,76%	-	-	5.280.000	2,79%	81.758.815	97%	96,87%	
	Pembinaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	90.000.000		8.906.000	13,81%	12.320.964	4.524.450	4.281.900	42,23%	9.079.364		18,16%			0,00%		12.898.722	75%	74,20%	
	Pembinaan dan peningkatan Layanan Kunjungan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100.000.000		5.280.000	5,28%	5.280.000		7.917.300	13,20%	5.280.000	2.299.307	7,96%			5.280.000	5,28%	68.884.303	32%	31,32%	
	Pemerataan,analisis,analisis,der pelipisan & biaya Perizinan berusaha berbasis risiko	40.000.000		21.000.000	52,50%			18.832.300	47,08%	-		0,00%			0,00%		167.700	100,00%	98,98%	
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	552.174.890		22.963.590	4,89%	24.380.000	13.740.450	83.713.890	22,88%	82.884.000	75.573.000	18.938.000	28,89%	21.285.000	15.895.000	3.980.000	7,28%	212.479.290	82%	81,82%
1	Pengembangan Pelaksanaan Perizinan Modal yang meliputi Kawasan Daerah Kabupaten/Kota	552.174.890		22.963.590	4,89%	24.380.000	13.740.450	83.713.890	22,88%	82.884.000	75.573.000	18.938.000	28,89%	21.285.000	15.895.000	3.980.000	7,28%	212.479.290	82%	81,82%
	Pembinaan Pemantauan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usaha	60.328.000						0,00%	-	8.500.000	10,77%			0,00%		0,00%	53.828.000	11%	10,77%	
	Bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha	296.187.000		4.872.500	1,65%	16.800.000	10.740.450	79.361.000	36,77%	82.886.000	75.573.000	8.430.000	45,34%	7.800.000	3.900.000	3,95%	38.793.000	81%	88,90%	
	Pengawasan Perizinan Modal	195.661.000		17.090.000	8,74%	7.530.000	3.000.000	5.382.800	8,12%	9.718.000		4.000.000	7,01%	13.485.000	18.008.000	14,98%	179.890.000	39%	38,74%	
VI	PROGRAM PENGELOMPOKAN DATA SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	20.000.000		2.108.000	10,54%	832.000	-	8.041.900	34,37%	4.575.000		22,88%	-	-	-	0,00%	6.443.100	88%	87,78%	
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000		2.108.000	10,54%	832.000	-	8.041.900	34,37%	4.575.000		22,88%	-	-	-	0,00%	6.443.100	88%	87,78%	
	Pengelolaan, Penyajian dan Pemeliharaan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20.000.000		2.108.000	10,54%	832.000	-	8.041.900	34,37%	4.575.000		22,88%			0,00%		6.443.100	88%	87,78%	
TOTAL		10.483.586.620															2.338.101.808	88%	77,81%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				
Tinggi Tinggi																				

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENGELOMPOKAN
RI1	90% S 100%	Sangat Tinggi
RI2	75% S 90%	Tinggi
RI3	60% S 75%	Berimbang
RI4	51% S 60%	Rendah
RI5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dumai, Desember 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA DUMAI



Permana Utama Muddalif
NIP. 19660724 198602 1 002

BIMTEK BAGI PARA PELAKU USAHA



PENGAWASAN TERKAIT LKPM

